

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan negara yang terdampak virus *Covid-19* di seluruh dunia seperti Amerika, Spanyol dan Italia membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. Beberapa lembaga bahkan memprediksikan perlemahan ekonomi dunia, antara lain *International Monetary Fund* (IMF) yang memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Dampak wabah *Covid-19* kepada perekonomian negara-negara di dunia juga sangat dahsyat (Abdurrahman Firdaus Thaha, 2020).

Pandemi *Covid-19* yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Di Indonesia, Hal ini tentunya juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata, sektor perdagangan, industri termasuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) . Dampak dari *Covid-19* secara langsung sudah terlihat dari PHK besar-besaran di beberapa perusahaan, terjadi penutupan beberapa usaha yang berdampak kepada dirumahnya karyawan (Hardilawati, 2020).

Terhambatnya kegiatan ekonomi yang kemudian mempengaruhi pendapatan negara. Dampak *Covid-19* selain mempengaruhi pendapatan bisnis besar juga mempengaruhi usaha mikro yang banyak tersebar di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia memberikan pengaruh yang cukup besar, sehingga di masa pandemi ini banyak dampak negatif yang dirasakan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. Langkah- langkah penguncian (*lockdown*) telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba- tiba, dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Dalam survei awal, lebih dari 50% UMKM mengindikasikan bahwa mereka bisa gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan. Sejak itu, kebangkrutan telah menumpuk dan tingkat awal mulai runtuh (Abdurrahman Firdaus Thaha, 2020).

Saat ini pemerintah pun tengah serius meningkatkan UMKM di tengah pandemi *Covid-19*. Berbagai kebijakan dibuat, tujuannya untuk menyelamatkan sekaligus membantu UMKM dalam mempertahankan serta mengembangkan

usahanya. Salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional yang mengarah kepada sektor UMKM.

Di dalam kondisi yang penuh ketidak pastian pemerintah terus komitmen dalam memberikan subsidi bunga bagi UMKM untuk membayar cicilannya. Kemudian bentuk kontribusi bantuan pemerintah terakhir juga ditandai dengan peluncuran bantuan presiden produktif untuk UMKM. Di mana masing-masing UMKM diberikan Bantuan Presiden (Banpres) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp2,4 juta dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Catriana, 2020).

Banyaknya UMKM yang mendaftar untuk pengajuan menerima bantuan tersebut, menjadikan pihak pemerintah kesulitan menyaring dan menentukan UMKM mana yang memenuhi persyaratan dari mereka dan layak untuk di diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Agar masalah tersebut dapat teratasi maka penulis mencoba membangun “Sistem Penentuan Kelayakan UMKM Dalam Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dengan Metode *Decision Tree*”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Pihak pemerintah kesulitan menyaring dan menentukan UMKM mana yang memenuhi persyaratan dari mereka dan layak untuk di diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- b. Agar UMKM yang mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk yang benar-benar berhak menerima

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Sistem ini berbasis web
- b. Sistem hanya dapat menampilkan UMKM di Indonesia yang layak menerima Bantuan Lansung Tunai (BLT)

- c. Data penelitian ini didapatkan dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus.
- d. Atribut yang digunakan dalam menentukan kelayakan adalah omset, kapasitas usaha dan jumlah tenaga kerja.
- e. Untuk menentukan kelayakan UMKM menerima bantuan langsung tunai peneliti menggunakan metode *decision tree*.
- f. Admin dapat mengelola data Kelayakan UMKM
- g. User hanya dapat melihat dan mencari data UMKM yang telah dimasukkan oleh admin.

1.4. Tujuan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Membangun sistem penentuan kelayakan UMKM dalam penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- b. Membantu untuk mengurangi manipulasi data fiktif dalam penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1.5. Manfaat

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Memudahkan pihak pemerintah menyaring dan menentukan UMKM yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN